

ISBN 978-602-73170-0-0



PROSIDING

Seminar Nasional Kerja Sama
UNNES - AKMIL

Magelang, 9 September 2015



Strategi Implementasi Revolusi Mental Pemuda
dalam Mendukung Ketahanan Nasional

ISBN 978-602-73170-0-0



PROSIDING

Seminar Nasional Kerja Sama
UNNES - AKMIL

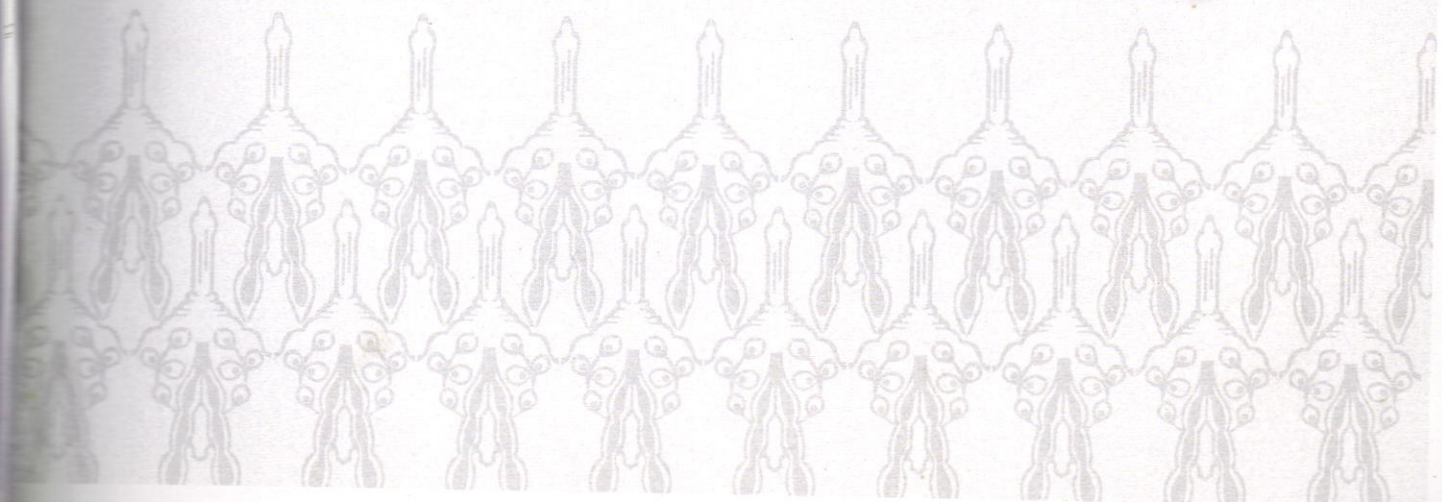
Magelang, 9 September 2015

Editor:

Mayor Cpl Dr. Budi Santoso, S.T., M.T.

Khoirul Anwar, S.Pd.

Strategi Implementasi Revolusi Mental Pemuda
dalam Mendukung Ketahanan Nasional



Daftar Artikel

1. AKADEMI MILITER- SEBAGAI PENGGERAK PERUBAHAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER KEBANGSAAN DAN KEPEMIMPINAN DIKALANGAN GENERASI MUDA INDONESIA MENDUKUNG GERAKAN REVOLUSI MENTAL 1
Mayor Jenderal TNI Hartomo
Gubernur Akademi Militer
2. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI GERAKAN REVOLUSI MENTAL UNTUK MENEGUHKAN KETAHANAN NASIONAL..... 10
Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.
Rektor Universitas Negeri Semarang
3. PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER GENERASI MUDA INDONESIA DALAM MENYIKAPI PERKEMBANGAN GLOBAL GUNA MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL 16
George Royke Deksino
Akademi Militer
4. PENDIDIKAN SEBAGAI KUNCI KEBERHASILAN DALAM MENYIAPKAN PEMUDA BERMENTAL KENEGARAWANAN DI TENGAH ARUS GLOBAL..... 21
Titiek Herawati, S.Sos., M.Si.
Akademi Militer
5. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN GUNA MENYIAPKAN PEMUDA INDONESIA YANG UNGGUL DALAM RANGKA MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL 30
Untung Hartono
Akademi Militer
6. REVOLUSI MENTAL PEMUDA INDONESIA MELALUI PENDIDIKAN BERBASIS MUTU DALAM MENYIAPKAN SDM DI ERA INDONESIA EMAS DALAM RANGKA MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL 35
Endang Sri K.
Akademi Militer
7. MEMBANGUN PEMAHAMAN AGAMA PEMUDA UNTUK AKSI SIKAP PLURALIS 43
Miftahuddin
Prodi Ilmu Sejarah FIS UNY
8. IMPLEMENTASI SINERGITAS NILAI KARAKTER KONSERVASI DENGAN REVOLUSI MENTAL MEWUJUDKAN MAHASISWA GENERASI MUDA MENUJU INDONESIA HEBAT 48
Rodia Tangwun
Universitas Negeri Semarang

9. MEMBANGUN BUDAYA BERKARYA DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN MILITER 55
Sukestiyarno
Universitas Negeri Semarang
10. INTERNALISASI NILAI-NILAI OLAH RAGA SEBAGAI INSTRUMEN REVOLUSI MENTAL UNTUK MEMBENTUK KARAKTER GENERASI MUDA..... 61
Fatoni dan Tommi Yuniawan
Universitas Negeri Semarang
11. PENDIDIKAN WAWASAN MULTIKULTURALISME SEBAGAI UPAYA PENGUATAN JATI DIRI DAN KETAHANAN NASIONAL 66
Iriyanto Widisuseno
Universitas Diponegoro
12. STRATEGI IMPLEMENTASI REVOLUSI MENTAL PEMUDA DALAM Mendukung KETAHANAN NASIONAL 70
Sutejo K. Widodo
Universitas Diponegoro
13. PERAN STRATEGIS PEMUDA INDONESIA DALAM MENANGKAL Ancaman Negara Untuk Mewujudkan KETAHANAN NASIONAL..... 79
Joko Tri Nugraha, S.sos, M.si.
Universitas Tidar
14. MENGELOLA KEBERAGAMAN, MELESATKAN KEJAYAAN BERBANGSA 87
Sumaryono
Universitas Gajah Mada

MEMBANGUN PEMAHAMAN AGAMA PEMUDA UNTUK AKSI SIKAP PLURALIS

Miftahuddin

Prodi Ilmu Sejarah FIS UNY

Email: miftah_uny@yahoo.com/miftahuddin@uny.ac.id

Abstract

Education, both at the family level, the community, as well as formal education an important position to shape the character and identity of the man. Moreover, religious education, it concerns the faith and confidence that will drive how people act and do something. Within this framework, then this article tries to show how it should be understood the Islamic religion and religious education model of what should be an option. This is all for a noble purpose, namely the establishment of national security of Indonesia as the ideals of the Founding Fathers. In this paper indicated that the religion of Islam is basically flexible and open to be understood. Diverse interpretations and understanding can arise even though essentially one, ie the Qur'an and Hadith. To that end, the person should not narrow understanding of Islam which is ultimately directed to the extremities, and stiffness in the act. Violence and brutality may arise from this narrow understanding of Islam. In order for the youth as the future generation is not stuck on the lack of proper understanding of this religion, then the choice of a model of religious education is of great importance. For example, a model of education offered NU and Muhammadiyah seems appropriate to establish an Islamic society in accordance with the context to the Indonesian-ness and humanity.

Keywords: Islam, Muhammadiyah, NU, Understanding Religion and Youth.

1. Pendahuluan

Di bumi Indonesia sering dipertontonkan adanya sikap-sikap masyarakat yang sama sekali tidak produktif dan mencidrai integrasi bangsa. Sikap tidak produktif ini juga menghambat pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia, yang sekaligus menjadikan lemahnya ketahanan nasional. Bukankah di Indonesia sering terjadi kerusakan berlatar belakang agama, pembakaran tempat-tempat beribadah, kekerasan atas nama perjuangan agama, sikap ekstrim, dan lain sebagainya. Hal ini sangatlah memprihatinkan bangsa ini, yang sejak awal sepakat untuk bersatu dalam perbedaan. Sepertinya, salah satu dari sikap tersebut adalah berangkat dari pemahaman agama masyarakat yang sempit dan tidak kontekstual. Agama hanya dipahami sebagai sesuatu yang tunggal dan tekstual, sehingga menutup kebenaran penafsiran dan pemahaman lain. Syafi'i Ma'arif menyinggung, bahwa, "Golongan non-Muslim sangat sadar tentang data sosiologis bangsa ini dengan jumlah Muslim yang terbesar itu. Tetapi mereka akan sangat tersiksa dan cemas, jika mereka diperlakukan secara diskriminatif, tidak punya kebebasan dalam menjalankan agama dan tradisinya yang beragam. Bahkan, tempat-tempat ibadah mereka sering menjadi sasaran amukan atas nama Tuhan."¹²

Untuk itu, bangsa ini sejak awal harus menyiapkan para pemudanya agar menjadi generasi yang tangguh, dan bukan generasi yang terjebak pada pengkonsumsian paham-paham keagamaan yang

sempit yang dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Selain itu, para pemuda juga harus diberi pemahaman tentang kondisi Indonesia yang sebenarnya. Misalnya, bahwa Indonesia adalah salah satu bangsa paling plural di dunia. Dengan tujuh belas ribu pulau yang ada di wilayahnya, baik besar maupun kecil, baik dihuni maupun tidak. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan negara dengan latar belakang paling beragam. Dengan sekitar empat ratus kelompok etnis dan bahasa yang ada di bawah naungannya, Indonesia juga adalah sebuah negara dengan kebudayaan sangat beragam¹³ termasuk agama. Keanekaragaman (pluralitas) agama yang hidup di Indonesia, termasuk di dalamnya keanekaragaman paham keagamaan yang ada di dalam tubuh intern umat beragama adalah merupakan kenyataan historis yang tidak bisa disangkal oleh siapa pun.¹⁴ Dalam konteks ini, di sinilah pentingnya membekali pemahaman agama pemuda dengan tepat agar dapat menjalankan, meminjam konsepnya Syafi'i Ma'arif, "Islam dalam bingkai ke-Indonesia-an dan kemanusiaan."¹⁵

2. Islam Agama Rahmatan Li al-'Alamin

Islam adalah ajaran yang memberi rahmat bagi semua yang ada di alam (*rahmatan li al-'alamin*) dapat diartikan bahwa ia adalah agama yang membawa perdamaian. Untuk itu, Islam tidak mengajarkan kepada pemeluknya kekerasan dan ekstrimitas. Sebaliknya, agama Islam menghargai

¹² Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 244-245.

¹³ Ali Maschan Moesa, *NU Agama dan Demokrasi: Komitmen Muslim Tradisional Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hlm. 159.

¹⁴ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 5

¹⁵ Lihat buku Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan...*

adanya perbedaan dan keberagaman. Jika ada orang yang bersikap arogan, membakar, menang-menangan, main hakim sendiri, dan lainnya, maka jelas itu bukanlah dari Islam. Benar bahwa dalam Islam ada ajaran *jihad*, tetapi bukan itu yang dimaksud. *Jihad* mengandung arti yang begitu luas dan intinya adalah ia lebih kepada ajaran perjuangan dengan bersungguh-sungguh untuk mendatangkan suatu kebaikan, atau yang lebih tepat *jihad* untuk memerangi hawa nafsu.

Sejak kedatangan Islam di bumi Indonesia, sepanjang menyangkut proses penyebarannya sebagai agama dan kekuatan kultur, sebenarnya ia telah menampakkan keramahannya. Dalam konteks ini, Islam disebarkan dengan cara damai, tidak memaksa pemeluk lain untuk masuk agama Islam, menghargai budaya yang tengah berjalan, dan bahkan mengakomodasikannya ke dalam kebudayaan lokal tanpa kehilangan identitasnya. Ternyata sikap toleran inilah yang banyak menarik simpatik masyarakat Indonesia pada saat itu untuk mengikuti ajaran Islam. Sementara itu, Walisanga adalah arsitek yang handal dalam pembumian Islam di Indonesia.

Menurut catatan Abdurrahman Mas'ud,¹⁶ Walisanga merupakan agen-agen unik Jawa pada abad XV-XVI yang mampu memadukan aspek-aspek spiritual dan sekuler dalam menyiarkan Islam. Posisi mereka dalam kehidupan sosiokultural dan religius di Jawa begitu memikat hingga bisa dikatakan Islam tidak pernah menjadi *the religion of Java* jika sufisme yang dikembangkan oleh Walisanga tidak mengakar dalam masyarakat. Rujukan ciri-ciri ini menunjukkan ajaran Islam yang diperkenalkan Walisanga di Tanah Jawa hadir dengan penuh kedamaian, walaupun terkesan lamban tetapi meyakinkan. Berdasarkan fakta sejarah, bahwa dengan cara menoleransi tradisi lokal serta memodifikasinya ke dalam ajaran Islam dan tetap bersandar pada prinsip-prinsip Islam, agama baru ini dipeluk oleh bangsawan-bangsawan serta mayoritas masyarakat Jawa di pesisir utara.

Transmisi Islam yang dipelopori Walisongo merupakan perjuangan brilian yang diimplementasikan dengan cara sederhana, yaitu menunjukkan jalan dan alternatif baru yang tidak mengusik tradisi dan kebiasaan lokal, serta mudah ditangkap oleh orang awam dikarenakan pendekatan-pendekatannya konkrit dan realistik, tidak *ajelimat*, dan menyatu dengan kehidupan masyarakat. Model ini menunjukkan keunikan sufi Jawa yang mampu menyerap elemen-elemen budaya lokal dan asing, tetapi dalam waktu yang sama masih berdiri tegar di atas prinsip-prinsip Islam.¹⁷

Demikian pula dikatakan, bahwa proses pergumulan Islam dengan kebudayaan setempat yang paling intensif terlihat pada zaman Walisanga. Masa ini merupakan masa peralihan besar dari Hindu-Jawa yang mulai pudar menuju fajar zaman Islam.

Keramahan terhadap tradisi dan budaya setempat itu diramu menjadi watak dasar budaya Islam pesantren. Wajah seperti itulah yang menjadikan Islam begitu mudah diterima oleh berbagai etnis yang ada di Nusantara. Hal ini terjadi karena ada kesesuaian antara agama baru (Islam) dan kepercayaan lama. Setidaknya, kehadiran Islam tidak mengusik kepercayaan lama, tetapi sebaliknya kepercayaan tersebut diapresiasi dan kemudian diintegrasikan ke dalam doktrin dan budaya Islam.¹⁸

Tampaknya Walisanga sadar, bagaimana seharusnya Islam dibumikan di Indonesia. Mereka paham bahwa Islam harus dikontekskan, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dan esensi ajaran, sesuai dengan kondisi wilayah atau bumi tempat Islam disebarkan. Inilah yang kemudian dikenal dengan konsep "pribumisasi Islam". Gagasan ini dimaksudkan untuk mencairkan pola dan karakter Islam sebagai suatu yang normatif dan praktek keagamaan menjadi sesuatu yang kontekstual. Dalam "pribumisasi Islam" tergambar bagaimana Islam sebagai ajaran yang normatif berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Lebih konkritnya, kontekstual Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan konteks zaman dan tempat. Perubahan waktu dan perbedaan wilayah menjadi kunci untuk kerja-kerja penafsiran dan ijtihad. Dengan demikian, Islam akan mampu terus memperbaharui diri dan dinamis dalam merespon perubahan zaman. Selain itu, Islam dengan lentur mampu berdialog dengan kondisi masyarakat yang berbeda-beda dan satu sama lain yang satu ke sudut yang lain. Kemampuan berdialog secara kritis inilah yang sesungguhnya akan menjadikan Islam dapat benar-benar *shalih li kull zaman wa makat*¹⁹ (cocok untuk setiap zaman dan tempat).

Praktik Islam Walisanga semestinya juga menyadarkan masyarakat bahwa terjadinya pluralitas budaya dan semangat agama yang sama tidak mungkin dihindari ketika agama tersebut telah menyebar ke wilayah-wilayah luas dengan latar belakang kultur yang berbeda-beda. Dalam interaksi dan dialog antara agama-agama dengan budaya lokal yang lebih bersifat lokal itu, saat itu semestinya akar budaya yang telah ada sebelumnya dengan sendirinya akan sangat memengaruhi semangat sehingga dalam dan kuat ajaran agama yang universal menanggapi realitas sosial budaya lokal. Dengan wajah agama itu dapat pula diidentifikasi wajah yang berbeda dari penganut agama yang sama sehingga kondisi sosial, budaya, masyarakat setempat yang berbeda dihadapi.²⁰

Jadi, yang perlu menjadi kesadaran umat manusia adalah bahwa pluralitas atau keragaman kebudayaan merupakan fakta alamiah dan manusiawi. Manusia dan masyarakat atau suatu *sunatullah*,

¹⁶Abdurrahman Mas'ud, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Awal Arsitek Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 54-56.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 67.

¹⁸Abdul Mun'im DZ, "Pergumulan Pesantren dengan Kebudayaan", dalam Badrus Sholeh (ed.), *Budaya Damai Komunitas Pesantren*, (Jakarta: LITSA, 2007), hlm. 41.

¹⁹"Shalih li kull zaman wa makat", dalam M. Imdadun, *Shalih li kull zaman wa makat: Membaca Realitas*, (Jakarta: LITSA, 2007), hlm. 10.

²⁰Abdurrahman Mas'ud, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Awal Arsitek Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 54-56.

sebagaimana disebutkan dalam penggalan ayat Al-Qur'an bahwa, "Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu mengenai pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan (Q. S. al-Maidah/5: 48)".

Manusia memang hidup dalam sebuah kenyataan pluralistik, baik dari segi ras, bahasa, agama, ideologi, kelompok politik, profesi, status sosial, dan ekonomi. Permasalahannya adalah bagaimana pluralitas sebagai suatu fakta tersebut ditafsirkan agar menjadi pluralitas sebagai sebuah visi, *mind-set* atau mentalitas setiap pemeluk agama atau dengan kata lain mengarahkan pluralitas *de facto* ke pluralitas *de jure*. Dengan adanya pemahaman pluralisme dan berbagai implikasinya, tentu saja akan dapat membawa kepada kesadaran mengenai pentingnya bersikap ramah dan penghargaan terhadap perbedaan.²¹

Dalam dataran aksi, pluralisme dapat disandingkan dengan arti keragaman. Keragaman (*diversity*) adalah perbedaan dalam persoalan agama, etnik, dan data demografis lainnya, sedangkan pluralisme (*pluralism*) adalah sistem nilai, sikap, dan proses yang bisa menterjemahkan realitas keragaman itu menjadi kohesi sosial yang berkelanjutan, stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, keragaman adalah sesuatu yang empiris, sedangkan pluralisme adalah ideologi atau orientasi dan sistem yang menerima keragaman itu sebagai nilai yang positif dan terus berusaha memfasilitasi proses negosiasi dan penyesuaian di antara mereka, tanpa berusaha memusnahkan salah satu atau sebagian dari keragaman itu. Misalnya, adanya perbedaan dalam persoalan agama dan kepercayaan adalah ciri utama setiap masyarakat, dan pluralisme adalah orientasi atau sistem yang mengasumsikan adanya penerimaan yang tulus atas fakta empiris tersebut dengan cara mengatur hubungan di antara komunitas agama yang berbeda, dan bukan berusaha meleburnya menjadi satu atau memusnahkan salah satunya.²²

3. Praktik Islam untuk Ketahanan Nasional

Jadi jelas bahwa praktik Islam yang menghargai pluralisme dan bukan Islam yang ekstrim, yang dapat menjamin terbentuknya integrasi nasional. Dengan demikian, bagaimana Islam dipraktikkan agar dapat diterima masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sehingga umat Islam dapat menjamin terciptanya integritas nasional yang pada akhirnya dapat mewujudkan ketahanan nasional sebagai cita-cita para pendahulu bangsa ini. Sebenarnya, bangsa ini telah diwarisi dan diberi tauladan oleh Walisanga bagaimana sebaiknya Islam dipraktikkan. Oleh karena

itu, jelas bahwa praktik Islam Walisanga itulah yang bisa menjawab semuanya.

Dengan mewarisi model Islam Walisanga, maka dapat diterjemahkan bahwa ketika Islam mau berperan dalam segala aspek kehidupan di Indonesia, yang tepat adalah peran substantif, yaitu mengembangkan pesan-pesan moral dengan tema-tema sentral, seperti keadilan dan egalitarianisme, bukan hanya menonjolkan simbol.²³ Sikap yang hanya mau menggunakan kata "syaikh", sorban, dan jubah sebagai ilustrasi, misalnya, adalah fenomena formalisasi Islam dan islamisasi perbuatan. Kecenderungan formalisasi Islam dalam kehidupan masyarakat dan islamisasi perbuatan dalam bentuk manifestasi simbolik ini jelas tidak menguntungkan karena hanya akan menimbulkan kekeringan substansi. Misalnya, dengan munculnya kelompok intelektual yang serba mau memformalkan Islam, dikhawatirkan Islam menjadi kehilangan relevansi. Padahal, islamisasi itu pada umumnya barulah pada Arabisasi budaya, yaitu semakin banyaknya dipakai terminologi Arab yang berasal dari *nash*. Sementara itu, Arabisasi tersebut mengandung bahaya.²⁴

Dengan pandangan semacam ini, rasanya menjadi penting bagi umat Islam Indonesia untuk lebih memasyarakatkan penghayatan Islam yang kosmopolit. Sebagai negara-bangsa yang majemuk dari segi etnis dan agama, mungkin Indonesia perlu belajar dan meniru Inggris. Jika kaum muslim Inggris yang jumlahnya sangat minoritas masih dihargai dan dihormati hak asasinya, umat Islam Indonesia pun seharusnya belajar untuk menghormati dan menghargai hak asasi pemeluk agama lain yang (mungkin) minoritas di Indonesia. Tidak boleh ada teror atau penghakiman terhadap pemeluk agama lain.²⁵

Sikap sebagaimana disinggung adalah sangat penting, karena bangsa Indonesia sudah mempunyai *modus vevendi* (kesepakatan luhur) untuk hidup bersatu dalam kebhinekaan dengan ikatan Pancasila. *Modus vevendi* itu menuntut masyarakat bangsa ini saling toleran dan beradab terhadap pemeluk agama lain tanpa melihat besar kecil jumlah pemeluk, karena persoalan keyakinan terhadap agama secara universal merupakan hak yang paling asasi. Secara sederhana Islam kosmopolitan dimaksudkan bahwa Islam itu harus bermanfaat bagi umat manusia, ramah, tidak ditakuti, dan menimbulkan kadamaian bagi setiap orang. Yang diperjuangkan dalam Islam kosmopolitan adalah nilai-nilai universal yang inklusif yang pasti diterima oleh setiap orang. Perjuangannya tidak menghendaki formalisasi atau simbol-simbol eksklusif yang memberi kesan mengecilkan kelompok lain, tetapi menekankan diri pada nilai dasarnya yang universal, seperti menegakkan keadilan dan hukum dalam bentuk perlawanan terhadap penguasa yang

²¹ Achmad Jainuri, Jainuddin Malik, dkk., *Terorisme dan Fundamentalisme Agama: Sebuah Tafsir Sosial*, (Malang: Bayumedia, 2003), hlm. 264-266.

²² Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, terj. Sri Murniati (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 391-392.

²³ Aden Wijdan SZ, dkk., *Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press), hlm. 136.

²⁴ Mujamil Qomar, *NU Liberal: Dari Tradisionalisme Ahlusunnah ke Universalisme Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 175.

²⁵ Mahfud MD, *Gus Dur: Islam, Politik, dan Kebangsaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 77.

sebagaimana disebutkan dalam penggalan ayat Al-Qur'an bahwa, "Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu mengenai pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan (Q. S. al-Maidah/5: 48)".

Manusia memang hidup dalam sebuah kenyataan pluralistik, baik dari segi ras, bahasa, agama, ideologi, kelompok politik, profesi, status sosial, dan ekonomi. Permasalahannya adalah bagaimana pluralitas sebagai suatu fakta tersebut ditafsirkan agar menjadi pluralitas sebagai sebuah visi, *mind-set* atau mentalitas setiap pemeluk agama atau dengan kata lain mengarahkan pluralitas *de facto* ke pluralitas *de jure*. Dengan adanya pemahaman pluralisme dan berbagai implikasinya, tentu saja akan dapat membawa kepada kesadaran mengenai pentingnya bersikap ramah dan penghargaan terhadap perbedaan.²¹

Dalam dataran aksi, pluralisme dapat disandingkan dengan arti keragaman. Keragaman (*diversity*) adalah perbedaan dalam persoalan agama, etnik, dan data demografis lainnya, sedangkan pluralisme (*pluralism*) adalah sistem nilai, sikap, dan proses yang bisa menterjemahkan realitas keragaman itu menjadi kohesi sosial yang berkelanjutan, stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, keragaman adalah sesuatu yang empiris, sedangkan pluralisme adalah ideologi atau orientasi dan sistem yang menerima keragaman itu sebagai nilai yang positif dan terus berusaha memfasilitasi proses negosiasi dan penyesuaian di antara mereka, tanpa berusaha memusnahkan salah satu atau sebagian dari keragaman itu. Misalnya, adanya perbedaan dalam persoalan agama dan kepercayaan adalah ciri utama setiap masyarakat, dan pluralisme adalah orientasi atau sistem yang mengasumsikan adanya penerimaan yang tulus atas fakta empiris tersebut dengan cara mengatur hubungan di antara komunitas agama yang berbeda, dan bukan berusaha meleburnya menjadi satu atau memusnahkan salah satunya.²²

3. Praktik Islam untuk Ketahanan Nasional

Jadi jelas bahwa praktik Islam yang menghargai pluralisme dan bukan Islam yang ekstrim, yang dapat menjamin terbentuknya integrasi nasional. Dengan demikian, bagaimana Islam dipraktikkan agar dapat diterima masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sehingga umat Islam dapat menjamin terciptanya integritas nasional yang pada akhirnya dapat mewujudkan ketahanan nasional sebagai cita-cita para pendahulu bangsa ini. Sebenarnya, bangsa ini telah diwarisi dan diberi tauladan oleh Walisanga bagaimana sebaiknya Islam dipraktikkan. Oleh karena

itu, jelas bahwa praktik Islam Walisanga itulah yang bisa menjawab semuanya.

Dengan mewarisi model Islam Walisanga, maka dapat diterjemahkan bahwa ketika Islam mau berperan dalam segala aspek kehidupan di Indonesia, yang tepat adalah peran substantif, yaitu mengembangkan pesan-pesan moral dengan tema-tema sentral, seperti keadilan dan egalitarianisme, bukan hanya menonjolkan simbol.²³ Sikap yang hanya mau menggunakan kata "syaikh", sorban, dan jubah sebagai ilustrasi, misalnya, adalah fenomena formalisasi Islam dan islamisasi perbuatan. Kecenderungan formalisasi Islam dalam kehidupan masyarakat dan islamisasi perbuatan dalam bentuk manifestasi simbolik ini jelas tidak menguntungkan karena hanya akan menimbulkan kekeringan substansi. Misalnya, dengan munculnya kelompok intelektual yang serba mau memformalkan Islam, dikhawatirkan Islam menjadi kehilangan relevansi. Padahal, islamisasi itu pada umumnya barulah pada Arabisasi budaya, yaitu semakin banyaknya dipakai terminologi Arab yang berasal dari *nash*. Sementara itu, Arabisasi tersebut mengandung bahaya.²⁴

Dengan pandangan semacam ini, rasanya menjadi penting bagi umat Islam Indonesia untuk lebih memasyarakatkan penghayatan Islam yang kosmopolit. Sebagai negara-bangsa yang majemuk dari segi etnis dan agama, mungkin Indonesia perlu belajar dan meniru Inggris. Jika kaum muslim Inggris yang jumlahnya sangat minoritas masih dihargai dan dihormati hak asasinya, umat Islam Indonesia pun seharusnya belajar untuk menghormati dan menghargai hak asasi pemeluk agama lain yang (mungkin) minoritas di Indonesia. Tidak boleh ada teror atau penghakiman terhadap pemeluk agama lain.²⁵

Sikap sebagaimana disinggung adalah sangat penting, karena bangsa Indonesia sudah mempunyai *modus vivendi* (kesepakatan luhur) untuk hidup bersatu dalam kebhinekaan dengan ikatan Pancasila. *Modus vivendi* itu menuntut masyarakat bangsa ini saling toleran dan beradab terhadap pemeluk agama lain tanpa melihat besar kecil jumlah pemeluk, karena persoalan keyakinan terhadap agama secara universal merupakan hak yang paling asasi. Secara sederhana Islam kosmopolitan dimaksudkan bahwa Islam itu harus bermanfaat bagi umat manusia, ramah, tidak ditakuti, dan menimbulkan kadamaian bagi setiap orang. Yang diperjuangkan dalam Islam kosmopolitan adalah nilai-nilai universal yang inklusif yang pasti diterima oleh setiap orang. Perjuangannya tidak menghendaki formalisasi atau simbol-simbol eksklusif yang memberi kesan mengecilkan kelompok lain, tetapi menekankan diri pada nilai dasarnya yang universal, seperti menegakkan keadilan dan hukum dalam bentuk perlawanan terhadap penguasa yang

²¹ Achmad Jainuri, Jainuddin Malik, dkk., *Terorisme dan Fundamentalisme Agama: Sebuah Tafsir Sosial*, (Malang: Bayumedia, 2003), hlm. 264-266.

²² Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, terj. Sri Murniati (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 391-392.

²³ Aden Wijdan SZ, dkk., *Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press), hlm. 136.

²⁴ Mujamil Qomar, *NU Liberal: Dari Tradisionalisme Ahlusunnah ke Universalisme Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 175.

²⁵ Mahfud MD, *Gus Dur: Islam, Politik, dan Kebangsaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 77.

korup dan zalim, pembelaan terhadap kaum lemah, dan sebagainya.²⁶

Dari semua itu, NU dengan lembaga pesantrennya dan Muhammadiyah dengan sekolahnya adalah dua organisasi yang telah teruji di Indonesia. Praktik Islam yang diajarkan kedua organisasi tersebut terbukti menyuguhkan Islam yang ramah dan toleran, serta Islam yang terbingkai ke-Indonesia-an dan kemanusiaan. Oleh karena itu, dua organisasi itulah sebenarnya yang telah mewarisi pesan-pesan yang telah diajarkan Walisanga di Indonesia. Sebenarnya tidak aneh, karena dalam sejarah Indonesia, dua organisasi inilah yang banyak andil dalam membentuk Indonesia merdeka, Indonesia yang sepekat bersatu membangun dalam bingkai kebinekaan.

Dengan tesis di atas, maka tidaklah salah apabila generasi penerus bangsa yang beragama Islam ini sebisa mungkin diarahkan untuk berkecimpung dalam lembaga pendidikan yang telah dibangun oleh organisasi NU maupun Muhammadiyah. Dalam konteks ini, Syafi'i menegaskan, "Belakangan Muhammadiyah dan NU yang mewakili arus besar Islam di Indonesia telah bahu membahu dalam mengibarkan panji-panji Islam terbuka, modern, dan moderat, sebuah model sosial yang sangat strategis bagi kelangsungan Indonesia sebagai bangsa yang plural pada masa-masa yang akan datang. Sudah menjadi semacam aksioma, selama NU dan Muhammadiyah bergandengan tangan, bangsa ini tetap merasa aman dari ancaman radikalisme ekstrem."²⁷

Sikap moderasi Muhammadiyah sebenarnya sejak awal telah dibangun oleh pendiri organisasi ini, yaitu K.H. Ahmad Dahlan. Dikatakan, bahwa salah satu pelajaran yang paling penting dari kepemimpinan Ahmad Dahlan adalah komitmen kuatnya kepada sikap moderat dan toleransi beragama. Selama kepemimpinannya dapat terlihat adanya kerja sama kreatif dan harmonis dengan hampir semua kelompok masyarakat. Bahkan, dengan rekan Kristennya, beliau mampu mengilhami rasa hormat dan kekaguman. Contoh yang paling menarik dari kemampuan K.H. Ahmad Dahlan adalah mengikat persahabatan erat dengan banyak pemuka agama Kristen. Kenyataan, bahwa beliau dikenal sebagai orang yang toleran terhadap kaum misionaris Kristen, akan tetapi tidak berarti lantas beliau mengkompromikan prinsip-prinsipnya. Dia adalah seorang praktisi dialog antar-agama yang sejati, dalam pengertian dia mendengar apa yang dikatakan dan memperhatikan apa yang tersirat di balik kata yang diucapkan.²⁸ Dalam perkembangan lebih lanjut, Syafi'i mencatat, bahwa "gerakan modernis itu, terutama Muhammadiyah semakin mempertimbangkan dimensi kultural dalam gerak dakwahnya sehingga terasa menjadi lebih lentur tanpa kehilangan prinsip dan misi utamanya. Persis

dan Al-Imyad tetap bertahan, tetapi tidak pernah mengikis mitranya Muhammadiyah yang terus berkembang."²⁹

Sementara itu, sikap moderasi NU pada dasarnya tidak terlepas dari sikap *Ahlusunnah waljama'ah* (*Ahluwaj*) yang dapat digolongkan paham moderat. Dalam Anggaran Dasar NU dikatakan, bahwa NU sebagai *Law yang Dirajut Islamiyah* berakidah Islam memusat paham *Ahlusunnah waljama'ah* dengan mengikis mazhab empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Penjelasannya secara terperinci, bahwa dalam bidang akidah, NU mengikuti paham *Ahlusunnah waljama'ah* yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan al-Bayhaqi, dan Imam Abu Mansyur Al-Maturidi. Dalam bidang fiqh, NU mengikuti jalan pendidikan (*al-madrasah*) dari Mazhab Abu Hanifah Al-Nai'man, Imam Malik ibn Anas, Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbali. Dalam bidang tasawuf mengikuti antara lain Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali, serta imam-imam yang lain.³⁰

Perilaku *Ahlusunnah waljama'ah* dapat diartikan sebagai "sikap pengikat tradisi Nabi Muhammad dan para (kesepakatan) ulama".³¹ Sementara itu, sikap moderasi (*tawasuth*) merupakan ciri *Ahlusunnah waljama'ah* yang paling menonjol, di samping sikap *ta'awun* (bersikap adil), *tawazun* (bersikap seimbang), dan *taswul* (bersikap toleran), sehingga ia memiliki sikap bermusyawarah dan pemikiran yang ekstrim (*ta'awun*) yang dapat melahirkan penyimpangan dan penyimpangan dari ajaran Islam. Dalam pemikiran kelompok, juga dikembangkan keseimbangan (*ta'awun*) antara penggunaan wahyu (*wahyiah*) dan *ra'i* (*ra'iyyah*) sehingga dimungkinkan sikap sangat akomodatif terhadap perubahan-perubahan di masyarakat sepanjang tidak melawan sistem-doktrin yang dogmatis. Masih sebagai konsekuensinya terhadap sikap moderat, *Ahlusunnah waljama'ah* juga memiliki sikap-sikap yang lebih toleran terhadap madzab di banding dengan paham kelompok-kelompok Islam lainnya. Bagi *Ahlusunnah waljama'ah* madzab madzab memiliki makna penting dalam kehidupan kelompok. Suatu tradisi tidak langsung ditentang atau ditentang, juga tidak diterima seluruhnya, atau diterima secara bertahap di-Islamisasi (*al-islam al-ghaybi al-ghaybi*).³²

Pemikiran sebagai sikap toleransi terhadap pluralisme pemikiran. Sebagai pikiran yang tumbuh dalam masyarakat madzab merupakan penguatan yang apresiatif. Dalam hal ini, sikap sangat responsif terhadap hasil pemikiran berbagai madzhab, bukan saja yang masih ada di segala-galanya masyarakat (Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), melainkan juga terhadap madzhab-madzhab yang pernah lahir, seperti Imam Ja'far al-Baqiri, Imam

²⁶ *Ibid.*, hlm. 78.

²⁷ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan...*, hlm. 35.

²⁸ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Wacana, 1997), hlm. 311-312.

²⁹ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan...*, hlm. 62.

³⁰ Mujamil Qomar, *NU dalam Sejarah dan Persepektif...*, hlm. 62.

³¹ Zamakhsyari Djalil, *Tradisi Keislaman: Studi Tentang Pendirian Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 100.

³² *Ibid.*, hlm. 65.

Abdurrahman al-Auza'i, Imam Sufyan al-Tsauri, dan lain-lain.³³

4. Kesimpulan

Pasca runtuhnya Orde Baru banyak bermunculan kelompok-kelompok dalam Islam yang gerakannya cenderung radikal. Golongan radikal ini tumbuh seperti jamur di musim penghujan. Terindikasi bahwa mereka adalah kepanjangan dari gerakan Islam trans-nasional. Tentu saja keberadaan mereka apabila mendapat angin segar dan tanggapan positif masyarakat Indonesia, maka akan semakin merapuhkan ketahanan nasional Indonesia. Mengapa demikian, dikarenakan Islam di Indonesia yang awalnya disuguhkan dengan ramah dan kedamaian menjadi Islam yang brutal dan tidak toleran. Jika Islam garis keras itu tersebar dan dikonsumsi masyarakat dapat diyakini banyak masyarakat Indonesia lainnya yang tersakiti, dan pada akhirnya sulit untuk mencapai integrasi, kebersamaan, atau persatuan. Padahal, persatuan adalah hal yang vital demi terciptanya Indonesia maju dan jaya. Semua itu, kuncinya adalah bagaimana persebaran Islam radikal itu dapat dibendung, dan bagaimana edukasi agama sebagaimana yang ditradisikan NU dan Muhammadiyah dapat terlaksana dengan baik, baik dalam keluarga, lingkungan, maupun dalam pendidikan formal. Dapat diyakini, jika hal ini terlaksana maka satu dari permasalahan yang dapat mengancam ketahanan nasional Indonesia dapat teratasi.

Daftar Pustaka

- Abdul Mun'im DZ, "Pergumulan Pesantren dengan Kebudayaan", dalam Badrus Sholeh (ed.), *Budaya Damai Komunitas Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 2007).
- Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, terj. Sri Murniati, (Bandung: Mizan, 2007).
- Abdurrahman Mas'ud, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Achmad Jainuri, Jainuddin Malik, dkk., *Terorisme dan Fundamentalisme Agama; Sebuah Tafsir Sosial*, (Malang: Bayumedia, 2003).

- Aden Wijdan SZ. dkk, *Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press).
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: Mizan, 2009).
- Ali Maschan Moesa, *NU Agama dan Demokrasi: Komitmen Muslim Tradisional Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002).
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1997).
- Amin Abdullah, M., *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Bambang Pranowo, *Islam Faktual: Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, (Yogyakarta: Adicita, 1999).
- Husein Muhammad, "Memahami Sejarah Ahlus Sunnah Waljamaah: Yang Toleran dan Anti Ekstrem", dalam Imam Baehaqi (ed.), *Kontroversi Aswaja*, (Yogyakarta: LKiS, 1999).
- Imdadun Rahmat, M., "Islam Pribumi, Islam Indonesia", dalam M. Imdadun Rahmat (et al.), *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, (Jakarta: Erlangga, 2003).
- Mahfud MD, *Gus Dur: Islam, Politik, dan Kebangsaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010).
- Mujamil Qomar, *NU Liberal; Dari Tradisionalisme Ahlusunnah ke Universalisme Islam*, (Bandung: Mizan, 2002).
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1994).

Biografi Penulis

Miftahuddin adalah dosen di Jurusan Pendidikan Sejarah Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Penulis mendapatkan gelar Magister Humaniora di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2003. Fokus pengajaran dan penelitiannya adalah pada sejarah kebudayaan dan sejarah sosial. Untuk informasi lebih lanjut, penulis dapat dihubungi melalui alamat email miftah_uny@yahoo.com/miftahuddin@uny.ac.id.

³³Husein Muhammad, "Memahami Sejarah Ahlus Sunnah Waljamaah: Yang Toleran dan Anti Ekstrem", dalam Imam Baehaqi (ed.), *Kontroversi Aswaja*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 40.